



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

|TAHUN 2025



BIRO PERENCANAAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas Rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Biro Perencanaan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2025 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi yang dipercayakan atas kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja, serta untuk menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja di tim kerja rencana dan pembiayaan; program dan anggaran; monitoring evaluasi, kinerja, dan manajemen risiko; serta urusan umum dan tata usaha di lingkungan BMKG. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi Biro Perencanaan dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya. Biro Perencanaan telah berupaya melaksanakan pengukuran kinerja organisasi secara keseluruhan, bukan sekedar mengukur keberhasilan program dan kegiatan semata.

Capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama Tahun 2025 yang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2025. Baik capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang belum memenuhi sasaran akan dianalisis lebih lanjut dalam rangka mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya dalam upaya mencapai visi dan misi Biro Perencanaan.

Setelah disusunnya Laporan Kinerja Biro Perencanaan BMKG Tahun 2025 kami berharap akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Biro Perencanaan BMKG pada Tahun 2026 mendatang. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, 28 Februari 2026

Kepala Biro Perencanaan BMKG



Haryo Seno Pranandito

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	1
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	2
1.4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	4
1.5 ASPEK STRATEGIS	4
1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029	7
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	9
BAB III AKUNTABILITAS	13
3.1 CAPAIAN KINERJA	13
3.2 EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN	15
3.3 REALISASI ANGGARAN BIRO PERENCANAAN	25
3.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	26
3.5 KINERJA LAIN-LAIN	28
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN DOKUMEN	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025	9
Tabel 2.2 Revisi Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025	11
Tabel 3.1 Nilai Kinerja Biro Perencanaan BMKG Tahun 2025 Berdasarkan Capaian dari Masing-Masing Indikator	13
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Kesatu (IK-1) Nilai SAKIP BMKG	15
Tabel 3.3 Perkembangan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2020-2025.....	16
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Kedua (IK-2) Nilai Hasil Evaluasi IKPA BMKG	19
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Ketiga (IK-3) Indeks Perencanaan Pembangunan	19
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Keempat (IK-4) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan	20
Tabel 3.7 Hasil Evaluasi Survey Kepuasan Layanan Biro Perencanaan Tahun 2021 s.d 2025...	22
Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Kelima (IK-5) Nilai Manajemen Risiko Indeks	23
Tabel 3.9 Analisa Atas Penggunaan Sumber Daya Biro Perencanaan Tahun 2025.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kelompok Jabatan Fungsional	4
Gambar 2.1 Uraian Singkat Renstra Biro Perencanaan BMKG Tahun 2025-2029	7
Gambar 2.2 Peta Strategis Biro Perencanaan 2025-2029.....	8
Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Nilai SAKIP BMKG dengan Target Jangka Menengah periode sebelumnya (Tahun 2020-2024) dan Tahun 2025	16
Gambar 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan...	23
Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2020-2025	26
Gambar 3.4 Display Aplikasi e-Kinerja	28
Gambar 3.5 Display Aplikasi e-BMKG.....	29
Gambar 3.6 Display Aplikasi SITAMPAN	29
Gambar 3.7 Display Aplikasi SULTAN	30
Gambar 3.8 Display Aplikasi WhatsApp Roren Center (Halaman Admin)	30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Biro Perencanaan BMKG Tahun 2025 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Biro Perencanaan sebagai unit organisasi BMKG dalam mewujudkan tata kelola perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi, transparan, serta berorientasi hasil. Melalui laporan ini, kinerja organisasi diukur secara objektif untuk memastikan bahwa seluruh program tata kelola perencanaan, penganggaran, dan pemantauan dan evaluasi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas layanan BMKG kepada Masyarakat.

Kebijakan dan program yang dijalankan sepanjang tahun 2025 merupakan penjabaran dari misi Biro Perencanaan BMKG dalam menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana dan tarif, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko serta penyusunan laporan kinerja dan anggaran, serta mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan efisien. Tahun 2025 juga merupakan tahun awal implementasi Renstra Biro Perencanaan BMKG Tahun 2025-2029, sehingga menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang modern, adaptif dan berorientasi global. Dalam konteks tersebut Biro Perencanaan BMKG menetapkan sasaran strategis utama yaitu Meningkatnya tata Kelola perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien.

Biro Perencanaan BMKG merupakan unit organisasi eselon II di bawah Sekretariat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan tarif, penyusunan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, anggaran, serta koordinasi kerjasama teknik, pinjaman/hibah luar negeri, yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program. Untuk itu, seluruh program kerja Biro Perencanaan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Utama BMKG tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan BMKG tahun 2025.

Secara umum hasil capaian kinerja Biro Perencanaan BMKG Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, tercermin dari rata-rata capaian kinerja sebesar 107,78% yang berarti kinerja organisasi secara keseluruhan melampaui target yang ditetapkan. Seluruh indikator kinerja berhasil mencapai target, dengan kisaran capaian antara 100% hingga 110%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian kinerja Biro Perencanaan BMKG telah berjalan secara efektif, konsisten dan berorientasi hasil.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian sasaran strategis dan indikator kinerja Biro Perencanaan BMKG sebagai berikut:

1. Perolehan Nilai SAKIP BMKG dari Target 76 Nilai mewujudkan realisasi 75,89 Nilai (kategori BB) dengan capaian kinerja 99,86%

2. Nilai Hasil Evaluasi IKPA pada Aspek Perencanaan Anggaran dari Target 87,5 Nilai mewujudkan realisasi 90,68% dengan capaian kinerja 103,63%
3. Indeks Perencanaan Pembangunan dari Target 95 Nilai mewujudkan realisasi 96,03 Nilai dengan capaian kinerja 99,82%
4. Indeks kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan dari Target 3,5 Skala Likert mewujudkan realisasi 3,5 Skala Likert, dengan capaian kinerja 100%
5. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) dari Target 2,75 Nilai mewujudkan realisasi 2,75 Nilai dengan capaian kinerja 100%

Dengan capaian kinerja yang telah mencapai target yang ditetapkan, Biro Perencanaan BMKG Tahun 2025 telah berhasil memperkuat fondasi pengembangan tata kelola perencanaan dan penganggaran serta pemantauan dan evaluasi, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja. Kedepan capaian ini akan menjadi modal penting bagi Biro Perencanaan untuk terus mendorong terwujudnya tata kelola perencanaan yang terintegrasi dan berorientasi hasil, serta mendukung BMKG dalam memberikan layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang semakin andal bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Kepala BMKG Nomor 02 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BMKG, Sekretariat Utama memiliki tiga unit kerja setingkat eselon II, yaitu Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Umum dan Keuangan dan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana dan tarif, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko serta penyusunan laporan kinerja dan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Biro Perencanaan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang berisi rencana capaian program selama lima tahun dan dituangkan dalam bentuk kegiatan strategis serta rencana alokasi anggarannya. Sasaran strategis yang dirumuskan tersebut kemudian diukur dan dievaluasi dalam suatu bentuk Laporan akuntabilitas Kinerja Tahunan. Laporan Akuntabilitas tahunan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun anggaran sekaligus sebagai alat pemantau laju peningkatan kinerja organisasi di setiap tahunnya. Selain itu, laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan juga disusun untuk memenuhi prinsip akuntabilitas yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kepala BMKG Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) dan terpercaya diperlukan penyelenggaraan SAKIP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025.

Memasuki akhir Tahun Anggaran 2025, maka disusunlah evaluasi kinerja yang menjabarkan realisasi dan capaian kinerja selama setahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025 yang akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, acuan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di Biro Perencanaan untuk perbaikan selanjutnya.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Biro Perencanaan adalah unit kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang berdasarkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Laksana BMKG, Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perencanaan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana dan tarif, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko serta penyusunan laporan kinerja dan anggaran.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana, tarif, dan pinjaman/hibah luar negeri serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;
- b. Penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan program dan anggaran;
- c. Penyiapan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran;
- d. Koordinasi dan pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi manajemen risiko di lingkungan BMKG;
- e. Penyiapan penyusunan laporan kinerja dan anggaran; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya Biro Perencanaan terdiri atas 4 tim kerja, antara lain:

1. Tim Kerja Rencana dan Pembiayaan

Tim Kerja Rencana dan Pembiayaan memiliki tanggung jawab dalam penyusunan rencana strategis, rencana kerja, serta analisis pembiayaan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan BMKG. Fungsi utama tim ini meliputi:

- a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) BMKG dan Rencana Kerja (Renja) tahunan berdasarkan arah kebijakan nasional dan prioritas pimpinan.
- b. Melakukan analisis kebutuhan pembiayaan serta proyeksi anggaran jangka menengah dan panjang.
- c. Menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) secara makro untuk mendukung perumusan kebijakan dan prioritas lembaga.
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan BMKG serta instansi eksternal

terkait dalam penyusunan rencana dan pembiayaan.

2. Tim Kerja Program dan Anggaran

Tim Kerja Program dan Anggaran bertanggung jawab dalam perumusan, pengalokasian, dan pengendalian program serta anggaran BMKG agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Fungsi utama tim ini meliputi:

- a. Menyusun program dan kegiatan sesuai hasil perencanaan strategis dan prioritas lembaga.
- b. Melakukan penelaahan dan pengusulan anggaran kepada Kementerian/Lembaga terkait (Kemenkeu dan Bappenas).
- c. Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti RKA-K/L, TOR/RAB, serta mendukung proses revisi DIPA.
- d. Melakukan sinkronisasi antara program, kegiatan, dan output dengan indikator kinerja dan target capaian.

3. Tim Kerja Monitoring, Evaluasi, Kinerja dan Manajemen Risiko Pelaksanaan Anggaran

Tim Kerja Monitoring, Evaluasi, Kinerja dan Manajemen Risiko Pelaksanaan Anggaran berperan dalam melakukan pemantauan, pengukuran, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan anggaran. Fungsi utama tim ini meliputi:

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja BMKG.
- b. Menyusun laporan kinerja (LAKIP) serta rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- c. Mengembangkan dan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BMKG.
- d. Melakukan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan program dan anggaran.
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan data kinerja dan pelaporan secara digital dan terintegrasi.

4. Tim Kerja Urusan Umum dan Tata Usaha

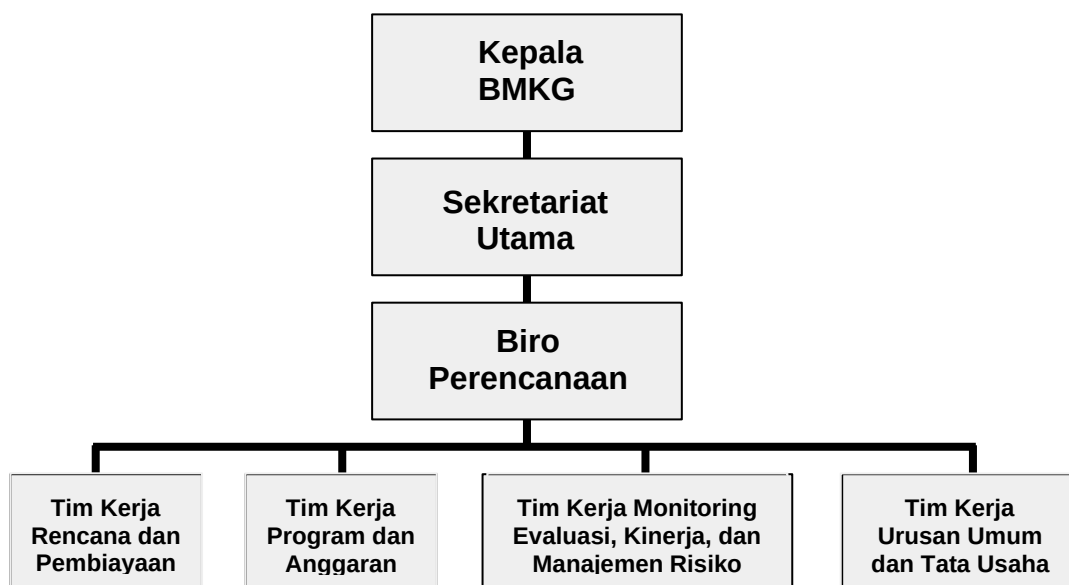
Tim Kerja Urusan Umum dan Tata Usaha memberikan dukungan administratif, logistik, dan pelayanan perkantoran untuk memastikan kelancaran operasional Biro Perencanaan. Fungsi utama tim ini meliputi:

- a. Mengelola administrasi surat-menyurat, kearsipan, dan dokumentasi kegiatan Biro.
- b. Mengatur pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran, termasuk kebutuhan logistik

dan pemeliharaan.

- c. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian internal (absensi, penilaian kinerja, dan urusan dinas).
- d. Menyusun dan memelihara data keuangan dan administrasi umum Biro Perencanaan.
- e. Mendukung penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kegiatan kedinasan lainnya.
- f. Menginventarisasi petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur tim kerja di lingkungan Biro Perencanaan.
- g. Melaksanakan koordinasi antar tim di Biro Perencanaan BMKG untuk memperkuat sinergi komunikasi dan kolaborasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi biro.

1.4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



Gambar 1.1 Kelompok Jabatan Fungsional

1.5 ASPEK STRATEGIS

Perencanaan menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam manajemen pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran unit organisasi di lingkungan BMKG baik ditingkat pusat dan satker unit pelaksana teknis di daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi MKG yang cepat, tepat, akurat, mudah dipahami dan luas jangkauannya.

Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Biro Perencanaan harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam

dokumen Rencana Strategis.

Rencana Strategis Instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan pemangku kepentingan. Biro Perencanaan sebagai unit yang melakukan koordinasi dan pelayanan di bidang manajemen kinerja perlu terus dilakukan penguatan kelembagaan agar pencapaian kinerja di masa datang dapat terus ditingkatkan sehingga hasil pelaksanaan tugas dapat memberikan kontribusi bagi tujuan dan sasaran organisasi BMKG.

Untuk itu, isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Biro Perencanaan yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pembiayaan.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran program.
3. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dan maturitas manajemen risiko.
4. Meningkatnya efisiensi layanan urusan umum dan tata usaha Biro.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Biro Perencanaan BMKG perlu terus melakukan perbaikan, dalam menjalankan tugas utamanya untuk koordinasi perencanaan dengan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat sehingga mampu beradaptasi. Dengan etos kerja tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran BMKG.

1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai organisasi Biro Perencanaan BMKG, dengan menekankan pada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Biro Perencanaan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan secara singkat Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi capaian Sasaran Kinerja masing-masing indikator sesuai dengan capaian hasil pengukuran kinerja dengan disertai analisa pencapaian indikator tersebut. Hasil capaian dilengkapi dengan analisa:

1. Capaian Kinerja Organisasi
 - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - d. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - e. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
2. Realisasi Anggaran

Berisi uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Biro Perencanaan BMKG sesuai dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025.
3. Kinerja Lain-lain

BAB IV PENUTUP/LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Lampiran-lampiran lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

Rencana Strategis Biro Perencanaan BMKG Tahun 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Biro Perencanaan BMKG melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Strategis Biro Perencanaan BMKG telah mengacu pada Rencana Strategis Biro Perencanaan tahun 2025-2029 dan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi. Uraian singkat Rencana Strategis Biro Perencanaan BMKG tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya perencanaan yang Andal dan Efektif untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

MISI

- Meningkatkan Kualitas perencanaan, pengelolaan tarif dan pinjaman dan hibah
- Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan BMKG
- Meningkatkan kompetensi dan kinerja SDM perencanaan
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan

TUJUAN

Terwujudnya Sistem Perencanaan, Penganggaran serta Pemantauan dan Evaluasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Gambar 2.1 Uraian Singkat Renstra Biro Perencanaan BMKG Tahun 2025-2029

Untuk lebih memberikan gambaran besar terhadap Visi Misi Tujuan dan Sasaran, maka berikut penjabaran empat misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, serta *learning and growth perspective* sebagai berikut:



Gambar 2.2 Peta Strategis Biro Perencanaan 2025-2029

1. *Stakeholders Perspective*

Menjabarkan tentang kepuasan *stakeholders* terhadap tata kelola di lingkungan Biro Perencanaan, menjadi Sasaran Strategis dari Biro Perencanaan yang akan dicapai yaitu **“Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien”**, yang merupakan sasaran kegiatan dalam Renstra Lembaga.

2. *Customers Perspective*

Customer Perspective Biro Perencanaan BMKG diarahkan pada peningkatan kualitas layanan kepada unit kerja sebagai pengguna utama layanan perencanaan, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi. Melalui layanan yang responsif, tepat waktu, dan sesuai standar, Biro Perencanaan berperan sebagai mitra strategis dalam memastikan keselarasan kebijakan, kemudahan proses, dan kepastian informasi, guna mendukung pencapaian

kinerja organisasi BMKG yang efektif dan akuntabel.

3. *Internal Process Perspective*

Proses di dalam Biro Perencanaan sendiri yang menjadi perspektif ini adalah tiga inti proses yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan di dalam Biro Perencanaan, yakni:

- a. Meningkatnya layanan perencanaan, tarif, dan pinjaman hibah yang efektif.
- b. Meningkatnya layanan penganggaran secara efektif dan efisien.
- c. Meningkatnya pemantauan, pengendalian, evaluasi kinerja, dan manajemen risiko.

4. *Learning and Growth Perspective (input)*

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Biro Perencanaan. Input ini bersifat hidup atau dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi eksisting dari Biro Perencanaan yaitu:

- a. Tersedianya SDM yang kompeten, profesional dan berkarakter;
- b. Terselenggaranya pengelolaan anggaran Biro Perencanaan secara efisien dan akuntabel.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2025 merupakan dokumen penetapan kinerja yang memuat komitmen dan delegasi penugasan dari Sekretariat Utama BMKG kepada Biro Perencanaan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta target yang terukur. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Biro Perencanaan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja secara periodik.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disusun selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan BMKG. Keselarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis organisasi secara terukur dan akuntabel. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya tata kelola	1.1	Nilai SAKIP BMKG	76 Nilai

perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien	1.2	Nilai Hasil Evaluasi IKPA BMKG pada Aspek Perencanaan Anggaran	87,5 Nilai
	1.3	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan Evaluasi, Manajemen Risiko dan Kinerja	18 Dokumen
	1.4	Indeks Perencanaan Pembangunan	95 Nilai
	1.5	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan	3,50 Indeks
	1.6	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,8 Nilai

Pada PK Awal Tahun 2025, Biro Perencanaan menetapkan satu sasaran strategis, yaitu *Meningkatnya tata kelola perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien*. Sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam **6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang mencerminkan aspek akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan dan penganggaran, kualitas pelayanan internal, serta penguatan sistem pengendalian intern.

Keenam indikator kinerja tersebut meliputi:

1. **Nilai SAKIP BMKG** dengan target sebesar **76 Nilai**, sebagai ukuran tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencerminkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
2. **Nilai Hasil Evaluasi IKPA BMKG pada Aspek Perencanaan Anggaran** dengan target **87,5 Nilai**, yang menggambarkan kualitas perencanaan anggaran, ketepatan penyusunan dokumen, serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
3. **Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan Evaluasi, Manajemen Risiko dan Kinerja** dengan target **18 Dokumen**, yang mencerminkan komitmen Biro Perencanaan dalam menghasilkan dokumen-dokumen strategis dan operasional secara tepat waktu dan sesuai standar ketentuan yang berlaku.
4. **Indeks Perencanaan Pembangunan** dengan target **95 Nilai**, sebagai indikator yang mengukur kualitas proses perencanaan pembangunan serta efektivitas pengendalian dan evaluasi perencanaan di lingkungan BMKG.
5. **Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan** dengan target **3,50 Indeks**, yang menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang diberikan oleh Biro Perencanaan.
6. **Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)** dengan target **2,8 Nilai**, yang menunjukkan tingkat penerapan manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.

Secara keseluruhan, PK Awal Tahun 2025 dirancang untuk memberikan gambaran kinerja Biro Perencanaan secara komprehensif dan terintegrasi, mulai dari aspek akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan dan penganggaran, kepuasan layanan, hingga penguatan manajemen

risiko. Struktur indikator ini menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja Biro Perencanaan pada tahun berjalan sebelum dilakukan penyesuaian lebih lanjut melalui revisi Perjanjian Kinerja.

Dalam rangka memastikan keselarasan antara perencanaan kinerja dengan dinamika kebijakan organisasi, kebutuhan penajaman indikator, serta hasil revidi internal atas dokumen perencanaan, Biro Perencanaan melakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Revisi ini merupakan bagian dari mekanisme pengendalian manajemen kinerja yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang ditetapkan dengan kondisi aktual serta arah kebijakan organisasi pada tahun berjalan.

Reviu terhadap PK Awal Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, keterukuran, serta fokus pada indikator yang benar-benar bersifat strategis (outcome-oriented). Hasil revidi tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Hasil Revisi/Final Tahun 2025.

Secara substansi, sasaran strategis Biro Perencanaan tetap dipertahankan, yaitu *Meningkatnya tata kelola perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien*. Namun demikian, terdapat penyesuaian pada struktur indikator kinerja utama. Jumlah IKU yang semula sebanyak 6 (enam) indikator pada PK Awal disederhanakan menjadi 5 (lima) indikator pada PK Revisi.

Tabel 2.2 Revisi Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya tata kelola perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien	1.1	Nilai SAKIP BMKG	76 Nilai
		1.2	Nilai Hasil Evaluasi IKPA BMKG pada Aspek Perencanaan Anggaran	87,5 Nilai
		1.3	Indeks Perencanaan Pembangunan	95 Nilai
		1.4	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan	3,50 Skala Likert
		1.5	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,75 Nilai

Penyederhanaan ini dilakukan untuk meningkatkan fokus pengukuran kinerja pada indikator-indikator yang memiliki daya ungkit strategis terhadap peningkatan tata kelola perencanaan dan penganggaran. Indikator **Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran,**

Pemantauan Evaluasi, Manajemen Risiko dan Kinerja yang pada PK Awal ditargetkan sebanyak 18 dokumen, tidak lagi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama dalam PK Revisi. Penyesuaian tersebut bukan berarti menghilangkan substansi pelaksanaan tugas, melainkan mengintegrasikan pengukuran output dokumen ke dalam mekanisme pengendalian kegiatan dan pengukuran kinerja pada level operasional maupun individu (cascading kinerja). Dengan demikian, indikator pada level strategis menjadi lebih ringkas dan berorientasi pada kualitas hasil (outcome), bukan semata-mata kuantitas output.

Selain penyederhanaan jumlah indikator, terdapat pula penyesuaian target pada indikator **Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)**. Target yang semula ditetapkan sebesar 2,8 Nilai pada PK Awal disesuaikan menjadi 2,75 Nilai pada PK Revisi. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian sebelumnya, tingkat kematangan penerapan manajemen risiko, serta pertimbangan realistis terhadap strategi implementasi penguatan manajemen risiko pada tahun berjalan. Penetapan target yang lebih terkalibrasi diharapkan mampu mendorong pencapaian yang optimal tanpa mengurangi kualitas penerapan manajemen risiko.

Sementara itu, indikator lainnya tetap dipertahankan dengan target yang konsisten, yaitu:

1. Nilai SAKIP BMKG sebesar 76 Nilai;
2. Nilai Hasil Evaluasi IKPA BMKG pada Aspek Perencanaan Anggaran sebesar 87,5 Nilai;
3. Indeks Perencanaan Pembangunan sebesar 95 Nilai;
4. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan sebesar 3,50 (Skala Likert).

Konsistensi pada indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa fokus utama peningkatan kinerja tetap diarahkan pada penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kualitas layanan internal.

Dengan adanya revisi ini, Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025 menjadi lebih terarah, terfokus, dan selaras dengan prinsip manajemen kinerja yang efektif. Revisi PK tidak dimaksudkan untuk mengurangi komitmen kinerja, melainkan untuk memperkuat kualitas pengukuran, meningkatkan ketajaman indikator strategis, serta memastikan bahwa setiap target yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi di lingkungan BMKG.

BAB III AKUNTABILITAS

3.1 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan BMKG merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam PK dengan realisasinya.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja Biro Perencanaan BMKG tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Biro Perencanaan BMKG sebesar 102,42%. Data tersebut merupakan hasil pengolahan kinerja dengan menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC). Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada berikut:

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Biro Perencanaan BMKG Tahun 2025 Berdasarkan Capaian dari Masing-Masing Indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien	1.1	Nilai SAKIP BMKG	76 Nilai	75,89 Nilai	99,86%
		1.2	Nilai Hasil Evaluasi IKPA BMKG pada Aspek Perencanaan Anggaran	87,5 Nilai	92,7 Nilai	105,94%
		1.3	Indeks Perencanaan Pembangunan	95 Nilai	96,03 Nilai	101,08%
		1.4	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan	3,50 Skala Likert	3,71 Skala Likert	106%
		1.5	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,75 Nilai	2,728 Nilai	99,2%
Nilai Kinerja					102,42%	

*) Nilai MRI BMKG Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian masing-masing indikator menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik dalam mendukung Sasaran Strategis Biro Perencanaan, yaitu *Meningkatnya tata kelola perencanaan, penganggaran, pemantauan dan*

evaluasi yang efektif dan efisien. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

1. **Nilai SAKIP BMKG**

Target yang ditetapkan sebesar **76 Nilai**, dengan realisasi sebesar **75,89 Nilai**, sehingga tingkat capaian mencapai **99,86%**. Meskipun realisasi sedikit di bawah target numerik, capaian tersebut masih berada dalam kategori “Sangat Baik” dengan predikat “BB” yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada instansi dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

2. **Nilai Hasil Evaluasi IKPA BMKG pada Aspek Perencanaan Anggaran**

Target ditetapkan sebesar **87,5 Nilai**, dengan realisasi sebesar **92,7 Nilai**, sehingga capaian mencapai **105,94%** (melampaui target). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran telah berjalan optimal dan melebihi standar yang ditetapkan.

3. **Indeks Perencanaan Pembangunan**

Target sebesar **95 Nilai** berhasil direalisasikan sebesar **96,03 Nilai**, dengan tingkat capaian **101,08%** (melampaui target). Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan dan efektivitas koordinasi serta pengendalian perencanaan.

4. **Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan**

Target sebesar **3,50 (Skala Likert)** terealisasi sebesar **3,71**, dengan capaian **106%** (melampaui target). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Biro Perencanaan telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi pengguna layanan internal.

5. **Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)**

Target yang ditetapkan sebesar **2,75 Nilai**, dengan realisasi sebesar **2,728 Nilai**, sehingga tingkat capaian mencapai **99,2%**. Meskipun realisasi sedikit di bawah target numerik, capaian tersebut masih berada dalam kategori sangat baik dan menunjukkan konsistensi dalam penguatan nilai manajemen risiko. Sebagai catatan, nilai pada indikator ini masih menggunakan tahun 2024, karena penilaian MRI tahun 2025 masih menunggu hasil evaluasi BPKP.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh indikator yang telah terealisasi berada pada tingkat capaian di atas 90%, bahkan beberapa indikator melampaui target (over achievement). Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan telah berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan komitmen kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Capaian tersebut sekaligus mencerminkan keberhasilan Biro Perencanaan dalam menjaga kualitas tata kelola, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta memperkuat perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil.

3.2 EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN

Indikator 1: Nilai SAKIP BMKG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kemenpan RB melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Adapun hasil evaluasi AKIP BMKG tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Kesatu (IK-1) Nilai SAKIP BMKG

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1.1	Nilai SAKIP BMKG	76 Nilai	75,89 Nilai	99,86%

Berdasarkan Tabel 3.2, target Indikator Kinerja Kesatu (IK-1) yaitu **Nilai SAKIP BMKG** ditetapkan sebesar **76**, dengan realisasi sebesar **75,89**, sehingga tingkat capaian mencapai **99,86%**.

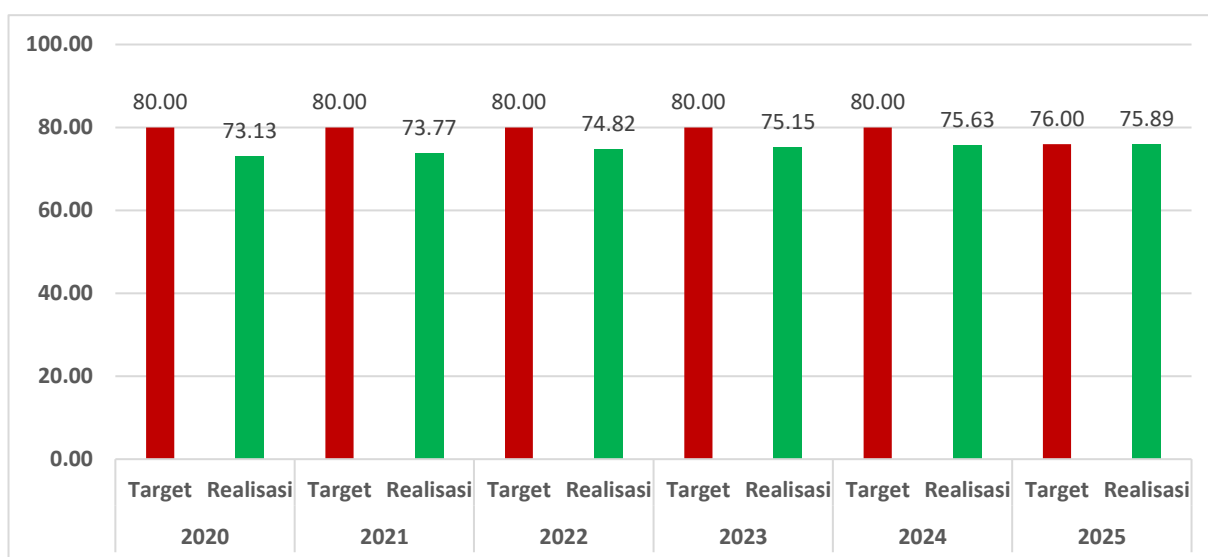
Realisasi Indikator Kinerja Kesatu (IK-1) dari Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan adalah sebesar **75,89 Nilai**, yang menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan sangat baik dan hampir sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun terdapat selisih kecil sebesar 0,14 poin dari target, capaian ini tetap berada dalam kategori “Sangat Baik” dengan predikat “BB” yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada instansi dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Perolehan nilai tersebut merupakan hasil evaluasi atas kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025. Salah satu komponen penting dalam mendukung capaian nilai SAKIP adalah ketepatan waktu dan kesesuaian standar dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya. Tabel Perbandingan Nilai AKIP yang diperoleh BMKG dari tahun 2020-2025 sebagai berikut.

Tabel 3.3 Perkembangan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2020-2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30 – 30	23,36	23,50	24,08	24,26	24,37	24,44
2	Pengukuran Kinerja	25 – 30	17,99	18,15	21,71	21,76	21,95	22,04
3	Pelaporan Kinerja	15 – 15	10,87	11,01	11,18	11,21	11,32	11,33
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10 – 25	6,49	6,61	17,85	17,91	17,99	18,08
5	Capaian Kinerja	20 – 0	14,42	14,50	-	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100 – 100	73,13	73,77	74,82	75,15	75,63	75,89
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB	BB	BB	BB

Berdasarkan tabel diatas, perolehan nilai SAKIP BMKG mengalami kenaikan dari tahun ke tahun baik dari sisi kenaikan pada tiap komponen maupun nilai akhir hasil evaluasi Hal ini menandakan keseriusan BMKG dalam melakukan upaya perbaikan berdasarkan rekomendasi dari Kemenpan RB.



Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Nilai SAKIP BMKG dengan Target Jangka Menengah periode sebelumnya (Tahun 2020-2024) dan Tahun 2025

Namun demikian, dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di BMKG masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Perencanaan kinerja belum secara jelas menjelaskan bagaimana intervensi instansi atau unit kerja berkontribusi terhadap pencapaian perubahan yang diharapkan Rantai hasil (results chain) dari ultimate outcome, intermediate outcome, immediate outcome, hingga output belum sepenuhnya menunjukkan hubungan sebab-akibat yang kuat.
2. Pelaksanaan identifikasi crosscutting kinerja masih perlu diperluas, tidak hanya terbatas pada keterhubungan internal organisasi, tetapi juga mencakup aktor eksternal dan pemangku kepentingan lain yang relevan. Penguatan pengelolaan crosscutting kinerja ini diperlukan agar kontribusi lintas aktor terhadap pencapaian shared outcome dapat tergambarkan secara lebih komprehensif, terstruktur, dan berorientasi hasil;
3. Penetapan rencana aksi pada sebagian unit kerja masih belum sepenuhnya menjabarkan langkah-langkah atau intervensi substantif yang selaras dengan pencapaian Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja (PK). Rencana aksi yang disusun belum menggambarkan tahapan perubahan yang mendasar untuk mendorong pencapaian outcome, karena polanya masih cenderung berorientasi pada pemenuhan aspek administratif dan rutinitas formalitas semata.
4. Pengintegrasian pemanfaatan sistem informasi manajemen kinerja dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi dan individu masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan secara konsisten dan optimal serta selaras dengan kebutuhan pengelolaan kinerja ke depan.
5. Pemanfaatan hasil pengukuran dan laporan kinerja tersebut belum optimal sebagai instrumen pengendalian dan perbaikan kinerja masih cenderung diposisikan sebagai dokumen administratif dan belum dimanfaatkan secara sistematis sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja, baik dalam penetapan target maupun perumusan strategi pada tahun dan periode perencanaan berikutnya.
6. Belum optimalnya penyelarasan kinerja, pemanfaatan informasi kinerja, serta konsistensi pelaporan capaian kinerja pada tingkat unit kerja. Masih ditemukannya isu kinerja yang relatif berulang dari periode sebelumnya menunjukkan tindak lanjut yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga siklus pengendalian dan perbaikan kinerja masih memerlukan penguatan
7. Keterbatasan waktu koordinasi lintas unit kerja dalam proses penyelarasan data dan indikator kinerja;
8. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kinerja di tiap unit kerja di BMKG masih terbatas, diperlukan pelatihan, workshop, bimtek mengenai SAKIP di BMKG.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, Biro Perencanaan tetap mampu menjaga kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, sehingga nilai SAKIP BMKG Tahun 2025 tetap berada pada tingkat capaian yang sangat tinggi.

Upaya dan Strategi ke depan dalam meningkatkan nilai SAKIP BMKG:

1. Biro Perencanaan akan terus melakukan penguatan pada aspek integrasi perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas indikator kinerja, serta optimalisasi evaluasi internal guna mendorong peningkatan nilai SAKIP secara berkelanjutan.
2. Memperkuat keterkaitan logis antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dengan menyusun perencanaan kinerja berbasis *results chain* yang jelas, sehingga setiap intervensi menunjukkan hubungan sebab-akibat dari output hingga ultimate outcome. Penguatan ini dapat dilakukan melalui penajaman sasaran dan indikator agar berorientasi pada hasil, penetapan critical success factors sebagai pengungkit utama kinerja, serta penyusunan pohon kinerja yang konsisten dari tingkat organisasi hingga unit kerja. Dengan demikian, arah perencanaan kinerja BMKG menjadi lebih terfokus dalam menjelaskan bagaimana program dan kegiatan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis.
3. Penguatan dan keberlanjutan praktik identifikasi crosscutting kinerja yang telah berjalan, dengan memperluas pemetaan peran dan kontribusi tidak hanya pada unit kerja internal, tetapi juga pada instansi terkait serta pemangku kepentingan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian *shared outcome*.
4. Melakukan reviu dan tinjauan ulang terhadap rencana aksi yang telah disusun dengan memastikan bahwa seluruh kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) didukung oleh aksi-aksi substantif yang selaras.
5. Memastikan keberlanjutan dan percepatan proses pengintegrasian pemanfaatan sistem informasi manajemen kinerja dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi dan individu.
6. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi secara rutin melalui penyelenggaraan forum dialog kinerja yang terstruktur antara pimpinan dan unit kerja, sehingga hasil pengukuran kinerja tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi dimanfaatkan secara efektif sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial, pengendalian pelaksanaan program, serta penjaminan pencapaian kinerja organisasi pada seluruh level.
7. Menjaga kualitas penyusunan laporan akuntabilitas kinerja sekaligus memastikan penerapan standar analisis kinerja yang konsisten pada seluruh unit kerja pusat dan daerah melalui penguatan pedoman, peningkatan kapasitas aparatur, dan mekanisme reviu berjenjang
8. Memanfaatkan hasil pengukuran dan laporan kinerja unit kerja pusat dan daerah perlu diperkuat sebagai dasar penyempurnaan perencanaan kinerja, khususnya dalam penetapan target dan strategi pencapaian kinerja, baik pada perencanaan tahunan maupun jangka menengah, sehingga sistem akuntabilitas kinerja dapat berfungsi secara efektif dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi.
9. Memperkuat kualitas tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja melalui penelusuran akar permasalahan yang lebih komprehensif serta penetapan langkah perbaikan yang konkret dan terukur.

10. Melakukan koordinasi dengan tim APIP dalam rangka peningkatan peran APIP yang perlu dioptimalkan melalui pengembangan mekanisme pemantauan tindak lanjut yang sistematis, dilakukan secara berkala, dan didukung dengan dokumentasi yang memadai.
11. Melaksanakan peningkatan kapabilitas SDM pengelola kinerja baik di unit kerja pusat dan satker daerah.

Indikator 2: Nilai Hasil Evaluasi IKPA BMKG pada Aspek Perencanaan Anggaran

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Kedua (IK-2) Nilai Hasil Evaluasi IKPA BMKG

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1.2	Nilai Hasil Evaluasi IKPA BMKG pada Aspek Perencanaan Anggaran	87,5 Nilai	92,7 Nilai	105,94%

Berdasarkan Tabel 3.4, target Indikator Kinerja Kedua (IK-2) yaitu **Nilai Hasil Evaluasi IKPA BMKG pada Aspek Perencanaan Anggaran** ditetapkan sebesar **87,5**, dengan realisasi sebesar **92,7**, sehingga tingkat capaian mencapai **105,94%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada aspek perencanaan anggaran telah melampaui target yang ditetapkan.

Realisasi sebesar 92,7 Nilai diperoleh berdasarkan hasil evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aspek perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Penilaian ini mencerminkan kualitas proses perencanaan anggaran, termasuk ketepatan penyusunan RKA-K/L, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta minimnya revisi anggaran yang bersifat korektif akibat perencanaan yang kurang optimal.

Capaian yang melebihi target tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara lebih cermat, terukur, dan selaras dengan prioritas program serta sasaran kinerja organisasi. Selain itu, penguatan koordinasi internal, peningkatan kualitas pengendalian perencanaan, serta monitoring berkala terhadap deviasi perencanaan dan realisasi anggaran turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai IKPA pada aspek perencanaan.

Dengan capaian sebesar 105,94%, indikator ini berada dalam kategori sangat baik dan menunjukkan bahwa tata kelola perencanaan anggaran di lingkungan BMKG telah berjalan efektif, akuntabel, serta mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

Indikator 3: Indeks Perencanaan Pembangunan

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Ketiga (IK-3) Indeks Perencanaan Pembangunan

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1.3	Indeks Perencanaan Pembangunan	95 Nilai	96,03 Nilai	101,08%

Berdasarkan Tabel 3.5, target Indikator Kinerja Ketiga (IK-3) yaitu **Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan** ditetapkan sebesar **95**, dengan realisasi sebesar **96,03**, sehingga tingkat capaian mencapai **101,08%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada aspek perencanaan pembangunan telah melampaui target yang ditetapkan.

Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) merupakan pengukuran efektivitas, kualitas, dan komprehensivitas proses perencanaan pembangunan dalam rangka memperkuat dan mempertajam keselarasan serta kesesuaian rencana pembangunan nasional. Tujuan dari Indeks Perencanaan Pembangunan antara lain untuk membantu memperbaiki praktik perencanaan secara berkelanjutan dan memperkuat keselarasan dan kesesuaian rencana Pembangunan nasional.

Cara Kerja Indeks Perencanaan Pembangunan, yaitu:

1. Mengukur kualitas perencanaan mulai dari proses, tahapan, dan produk pembangunan.
2. Merelasikan antara kondisi faktual dengan kualitas yang diharapkan.
3. Kualitas yang diharapkan merepresentasikan karakteristik, kriteria, atau kualifikasi-kualifikasi perencanaan yang berkualitas atau yang ideal.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 bagi seluruh Kementerian/Lembaga/daerah dimana penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) menjadi salah satu komponen penilaian RB General K/L dan Pemerintah Provinsi sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Nomor 182 Tahun 2024, serta sehubungan dengan surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian/Lembaga/Daerah (Pemerintah Provinsi), tujuan dari penilaian IPPN adalah untuk memastikan kualitas perencanaan yang telah disusun oleh instansi pemerintah berbasiskan dampak (outcome) untuk memastikan kebermanfaatan terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait.

Di Tahun 2025 ini BMKG memperoleh Hasil Penilaian IPPN K/L sebesar 101,08 dengan predikat Sangat Baik. Ini menjadi pencapaian yang sangat baik untuk BMKG dalam rangka pelaksanaan evaluasi RB Tahun 2025. Nilai Indeks Perencana Pembangunan tahun 2025 telah dilakukan pembahasan dan penandatanganan Berita Acara dengan Tim Bappenas terkait nilai IPPN pada bulan Desember 2025.

Indikator 4: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Keempat (IK-4) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1.4	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan	3,50 Skala Likert	3,71 Skala Likert	106%

Berdasarkan Tabel 3.6, target Indikator Kinerja Keempat (IK-4) yaitu **Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan** ditetapkan sebesar **3,50 (Skala Likert)**, dengan realisasi sebesar **3,71**, sehingga tingkat capaian mencapai **106%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada aspek kepuasan pengguna layanan telah melampaui target yang ditetapkan dan berada dalam kategori sangat baik.

Realisasi sebesar 3,71 Skala Likert mencerminkan bahwa layanan perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi yang diberikan oleh Biro Perencanaan telah memenuhi bahkan melebihi ekspektasi pengguna layanan. Sebagai unit kerja yang memberikan dukungan teknis dan administratif secara internal kepada seluruh satuan kerja BMKG, baik di tingkat pusat maupun daerah, Biro Perencanaan dituntut untuk memberikan pelayanan yang responsif, profesional, dan akuntabel.

Pengukuran indikator ini dilakukan melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan Biro Perencanaan, yaitu unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia. Survei dilaksanakan secara daring melalui sistem e-SKM dan didukung dengan penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada setiap semester selama Tahun 2025.

Instrumen survei terdiri atas 10 (sepuluh) unsur pertanyaan yang mencerminkan tiga aspek utama, yaitu:

1. Aspek Kualitas Layanan, meliputi:
 - a. Kecepatan waktu memberikan informasi;
 - b. Ketepatan waktu dalam memenuhi komitmen layanan;
 - c. Kecepatan merespons pertanyaan atau permintaan;
 - d. Kemampuan berkoordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e. Ketepatan dan keakuratan hasil layanan.
2. Aspek Profesionalisme SDM, meliputi:
 - a. Profesionalisme dan perilaku pegawai;
 - b. Etika dan cara berkomunikasi;
 - c. Pengetahuan dan pemahaman terhadap sistem perencanaan.
3. Aspek Peningkatan Sistem Layanan, meliputi:
 - a. Kemudahan menghubungi pegawai terkait;
 - b. Komitmen tim dalam peningkatan kualitas pelayanan.

Setiap unsur dinilai menggunakan Skala Likert 1–4, dengan kategori:

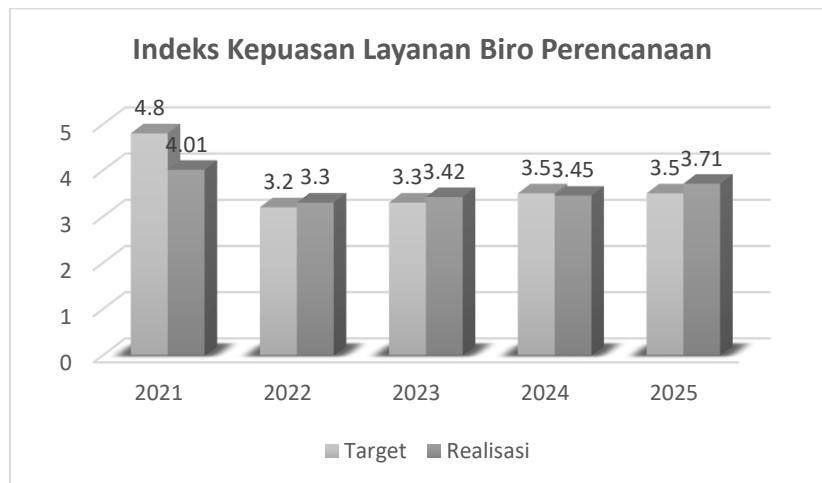
- 1 = Tidak Puas
- 2 = Cukup
- 3 = Puas
- 4 = Sangat Puas

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan diperoleh dari rata-rata seluruh unsur penilaian hasil survei. Berdasarkan hasil penghitungan Tahun 2025, diperoleh rata-rata indeks sebesar **85,68** (dalam konversi mutu layanan), yang berada pada kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.7 Hasil Evaluasi Survey Kepuasan Layanan Biro Perencanaan Tahun 2021 s.d 2025

No	No Unsur	Kategori Unsur	2025	2024	2023	2022	2021
1	U1	Kecepatan waktu memberikan informasi	85,65	85,55	85,43	83,19	83,4
2	U2	Ketepatan waktu dalam memenuhi janji	84,87	84,75	84,55	83,05	83,0
3	U3	Kecepatan dalam menjawab atau merespons pertanyaan	85,74	85,60	85,40	84,46	84,4
4	U4	Kemampuan berkoordinasi	86,50	86,33	86,13	84,60	84,60
5	U5	Ketepatan dan keakuratan hasil layanan	84,95	84,85	84,55	84,46	84,60
6	U6	Profesionalisme dan perilaku pegawai	86,00	85,83	85,63	85,45	85,50
7	U7	Etika dan cara berbicara pegawai	86,32	86,18	85,78	85,73	85,80
8	U8	Pengetahuan dan pemahaman pegawai	85,70	85,63	85,43	85,03	85,30
9	U9	Kemudahan menghubungi pegawai	85,85	85,70	85,50	85,45	85,30
10	U10	Komitmen tim dalam upaya peningkatan	86,70	86,43	86,03	84,75	85,00
Rata-rata			85,83	85,68	85,44	84,62	84,69

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya (2021–2024), secara umum terjadi tren peningkatan pada hampir seluruh unsur penilaian. Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024, yang mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas layanan Biro Perencanaan. Peningkatan ini merupakan hasil dari penguatan koordinasi internal, komitmen peningkatan kualitas pelayanan, serta responsivitas terhadap masukan pengguna layanan.



Gambar 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan

Grafik perbandingan target dan realisasi Indeks Kepuasan Layanan Tahun 2020–2025 juga menunjukkan bahwa capaian indikator secara konsisten berada di atas target Renstra, termasuk pada Tahun 2025 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Ke depan, langkah-langkah strategis yang akan terus dilakukan untuk meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Layanan antara lain:

1. Penguatan koordinasi antarbagian dalam rangka meningkatkan kualitas dan konsistensi layanan;
2. Peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder internal;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan survei dan tindak lanjut hasil survei secara real time;
4. Penguatan budaya pelayanan prima dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.

Dengan capaian sebesar 106%, indikator ini menunjukkan bahwa Biro Perencanaan tidak hanya memenuhi komitmen kinerja, tetapi juga berhasil membangun kepercayaan dan kepuasan pengguna layanan secara berkelanjutan.

Indikator 5: Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Kelima (IK-5) Nilai Manajemen Risiko Indeks

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1.5	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,75 Nilai	2,728 Nilai	99,2%

Berdasarkan Tabel 3.8, target Indikator Kinerja berupa **Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)** ditetapkan sebesar **2,75 Nilai**, dengan realisasi mencapai **2,728 Nilai** atau sebesar **99,2%** dari target yang telah ditentukan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah berjalan dengan baik dan hampir sepenuhnya memenuhi ekspektasi kinerja yang ditetapkan. Meskipun terdapat selisih

sebesar 0,022 poin dari target, hal ini tidak berdampak signifikan terhadap kualitas penerapan manajemen risiko, serta tetap mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam penguatan sistem pengendalian internal dan tata kelola organisasi yang efektif dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, BMKG telah melakukan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi dan masih dalam proses evaluasi oleh BPKP. Telah dilakukan tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (Penilaian Mandiri) Tahun 2025 sesuai arah kebijakan nasional.
2. Migrasi digital proses penilaian mandiri tahun 2024 dan tahun 2025 ke dalam sistem E-Integrity.
3. Unit Manajemen Risiko telah dibentuk dan terus mengembangkan proses identifikasi, analisis, serta mitigasi risiko program dan kegiatan.
4. Beberapa inisiatif internal telah dilakukan seperti:
 - a. Sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko bagi unit kerja secara bertahap.
 - b. Penyusunan Risk Register Level Entitas, Level Eselon I dan II (bertahap kepada level eselon III dan IV UPT di daerah).
 - c. Penggunaan sistem atau aplikasi pendukung SPIP dan manajemen risiko.
 - d. Integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pengendalian berbasis risiko.
 - e. Menyusun SOP Proses Manajemen Risiko yang terdiri dari:
 - SOP Analisis Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko
 - SOP Pemantauan Kejadian/Peristiwa Risiko
 - SOP Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian
 - SOP Pengajuan dan Validasi Usulan Risiko baru Unit Kerja
 - SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Unit Kerja
 - SOP Penyusunan Register Risiko Unit Kerja
 - SOP Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian
 - SOP Validasi Rencana Tindak Pengendalian

Rencana aksi yang dilakukan pada indikator ini antara lain:

1. Mereviu dan memvalidasi kembali keselarasan RPJMN 2025-2029 terhadap sasaran strategis, asaran program dan indikator serta target kinerja.
2. Melakukan Penerapan Teknologi dalam MR, Komitmen Pimpinan organisasi untuk menjadikan MR sebagai bagian dari budaya organisasi.
3. Melakukan pengarsipan melalui google drive yang dapat diakses oleh seluruh unit organisasi.
4. Mengimplementasikan sistem informasi RMIS dan E-Integrity dari BPKP yang mendukung pengelolaan risiko dan melakukan PM SPIP secara terintegrasi di Tingkat strategis dan

operasional.

5. Membuat SOP dan SK Kepala BMKG tentang Implementasi Manajemen Risiko di lingkungan BMKG, dan SK Tim Kerja Pengelola Risiko serta SK Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di lingkungan BMKG.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian identifikasi risiko dengan pencapaian kinerja di unit organisasi masing masing sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
7. Penyusunan laporan Tahunan Manajemen Risiko di lingkungan BMKG tahun 2024-2025.
8. Melakukan Kolaborasi antar Unit kerja melalui kegiatan Coaching Clinic dengan didampingi oleh narasumber ahli.
9. Menyelenggarakan dan Meningkatkan kompetensi pegawai terkait penyelenggaraan Manajemen Risiko.
10. Melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis atas kebijakan Manajemen Risiko kepada seluruh level pimpinan dan staf.
11. Menyusun struktur folder yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP dari Tim Evaluator BPKP.

3.3 REALISASI ANGGARAN BIRO PERENCANAAN

Realisasi anggaran Biro Perencanaan Tahun 2025 untuk seluruh jenis belanja mencapai sebesar **Rp5.858.184.434** atau **99,62%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp5.880.252.000**, dengan capaian realisasi fisik sebesar **100%**. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pagu anggaran Tahun 2025 mengalami penurunan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah pada tingkat nasional.

Penurunan pagu anggaran Biro Perencanaan pada Tahun 2025 tidak terlepas dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut mengamanatkan kepada seluruh kementerian/lembaga untuk melakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran guna mendukung penguatan kualitas belanja negara, menjaga kesehatan fiskal, serta memastikan alokasi anggaran lebih terfokus pada program prioritas nasional.

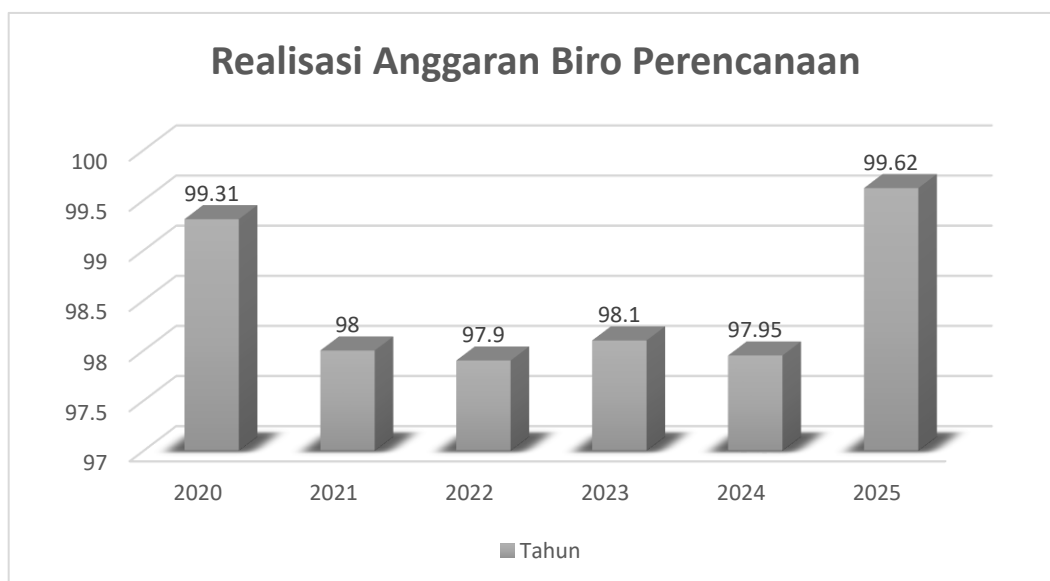
Sebagai bagian dari kementerian/lembaga pemerintah, Biro Perencanaan turut melakukan penyesuaian pagu anggaran, khususnya pada komponen belanja yang bersifat operasional dan dapat dioptimalkan tanpa mengurangi kualitas capaian output kegiatan. Penyesuaian tersebut antara lain dilakukan melalui efisiensi belanja perjalanan dinas, kegiatan rapat/koordinasi yang dialihkan ke metode daring, pembatasan belanja non-prioritas, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya internal.

Dampak kebijakan efisiensi ini terhadap Biro Perencanaan antara lain berupa penurunan pagu anggaran dibandingkan tahun sebelumnya serta perlunya penajaman kembali skala prioritas kegiatan. Namun demikian, penyesuaian tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian target fisik kegiatan. Hal ini tercermin dari realisasi fisik Tahun 2025 yang tetap mencapai 100%, serta realisasi keuangan yang tetap berada pada tingkat sangat tinggi yaitu 99,62%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Biro Perencanaan mampu melakukan penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan secara adaptif dan tetap menjaga efektivitas pelaksanaan program. Kebijakan efisiensi justru mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran, sehingga setiap alokasi belanja lebih terarah, terukur, dan berbasis pada kebutuhan riil organisasi.

Dengan demikian, meskipun terjadi penurunan pagu sebagai konsekuensi kebijakan nasional, kinerja pelaksanaan anggaran Biro Perencanaan Tahun 2025 tetap menunjukkan tingkat akuntabilitas dan efektivitas yang tinggi, serta selaras dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Perbandingan realisasi keuangan Biro Perencanaan dari tahun 2020 sampai 2025 ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2020-2025

3.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Biro Perencanaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

1. data capaian Nilai Pencapaian Indikator Kinerja;
2. data pagu anggaran; dan
3. data realisasi anggaran.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Rumus efisiensi yang digunakan bersumber dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{(AA \times CSS) - RA}{n} \times 100\%$$

Dimana:

- E = Efisiensi
 AA = Alokasi anggaran sasaran strategis
 RA = Realisasi anggaran sasaran strategis
 CSS = Capaian kinerja sasaran strategis
 n = Jumlah alokasi anggaran sasaran strategis

Adapun dari perhitungan rumus diatas, diperoleh hasil efisiensi tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.9 Analisa Atas Penggunaan Sumber Daya Biro Perencanaan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran Strategis (CSS)	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x CSS	(AA x CSS)-RA
1	Meningkatnya tata kelola perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien Indikator Kinerja: 1. Nilai SAKIP BMKG 2. Nilai Hasil Evaluasi IKPA BMKG pada Aspek Perencanaan Anggaran 3. Indeks Perencanaan Pembangunan 4. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan	102,42%	5.880.252.000	5.858.184.434	602.255.409.840	596.397.225.406

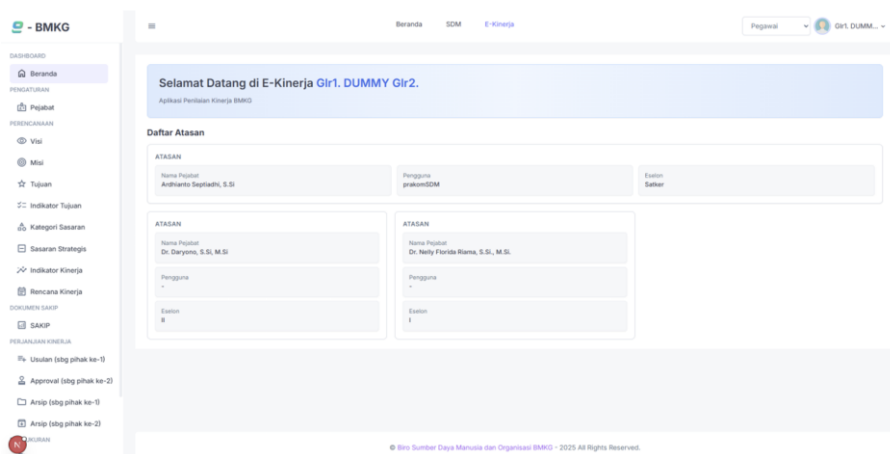
No.	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran Strategis (CSS)	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x CSS	(AA x CSS)-RA
	5. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)					
Efisiensi					10,14%	

Berdasarkan tabel diatas, nilai efisiensi Biro Perencanaan BMKG adalah sebesar **10,14%** yang didapatkan dari formulasi pagu anggaran, realisasi dan capaian kinerja.

3.5 KINERJA LAIN-LAIN

Disamping sasaran kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diuraikan diatas, di tahun 2025 Biro Perencanaan menghasilkan kinerja-kinerja lain yang belum termuat dalam Indikator kinerja, tetapi mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan, antara lain:

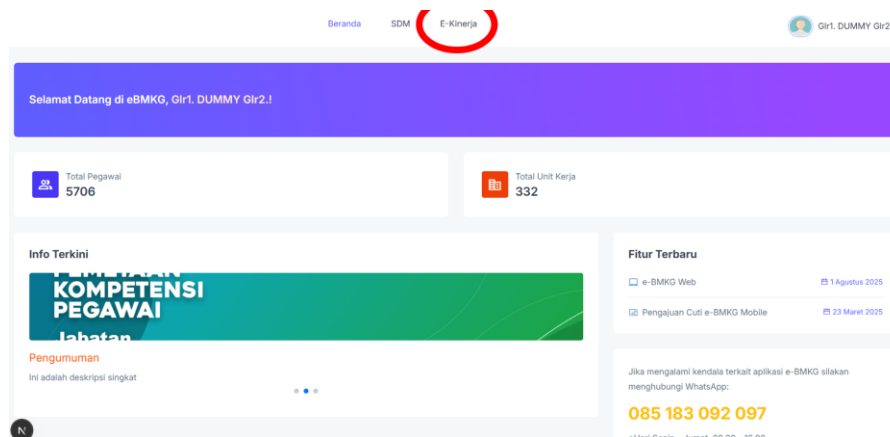
1. Pengembangan fitur pada Aplikasi e-Kinerja, dengan menambahkan penilaian berdasarkan bobot capaian kinerja, ketepatan data dukung, realisasi anggaran dan ketepatan waktu pengentrian. Dengan penilaian berdasarkan bobot membuat evaluasi kinerja dapat dilaksanakan oleh biro perencanaan. Aplikasi e-Kinerja BMKG merupakan wujud dari pengawalan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja melalui sistem informasi kinerja online BMKG. Aplikasi e-Kinerja merupakan jawaban BMKG atas rekomendasi dari Tim evaluator Menpan RB terkait ketersediaan informasi kinerja secara online sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan agar pemanfaatan aplikasi ini oleh pimpinan bisa lebih optimal.



Gambar 3.4 Display Aplikasi e-Kinerja

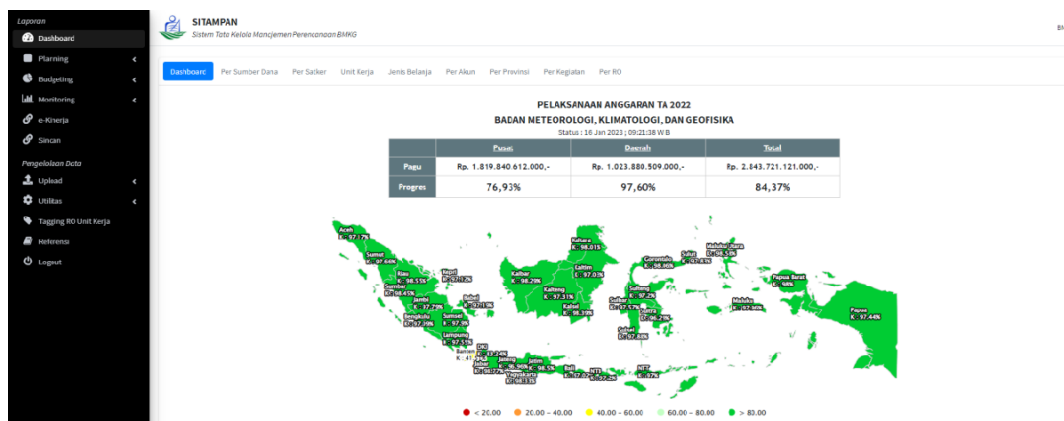
2. Integrasi Aplikasi e-Kinerja ke dalam Aplikasi e-BMKG. Integrasi aplikasi e-Kinerja ke dalam e-BMKG merupakan langkah strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam memperkuat tata kelola kinerja yang terintegrasi, efektif, dan akuntabel. Melalui integrasi ini,

perencanaan dan pengukuran kinerja individu (SKP) terhubung langsung dengan sistem perencanaan, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi organisasi, sehingga tercipta keselarasan antara kinerja pegawai dan capaian indikator kinerja utama (IKU) unit maupun instansi. Kebijakan ini meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas dan konsistensi data kinerja, serta mendukung penguatan implementasi SAKIP melalui keterpaduan proses perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja dalam satu platform terpadu.



Gambar 3.5 Display Aplikasi e-BMKG

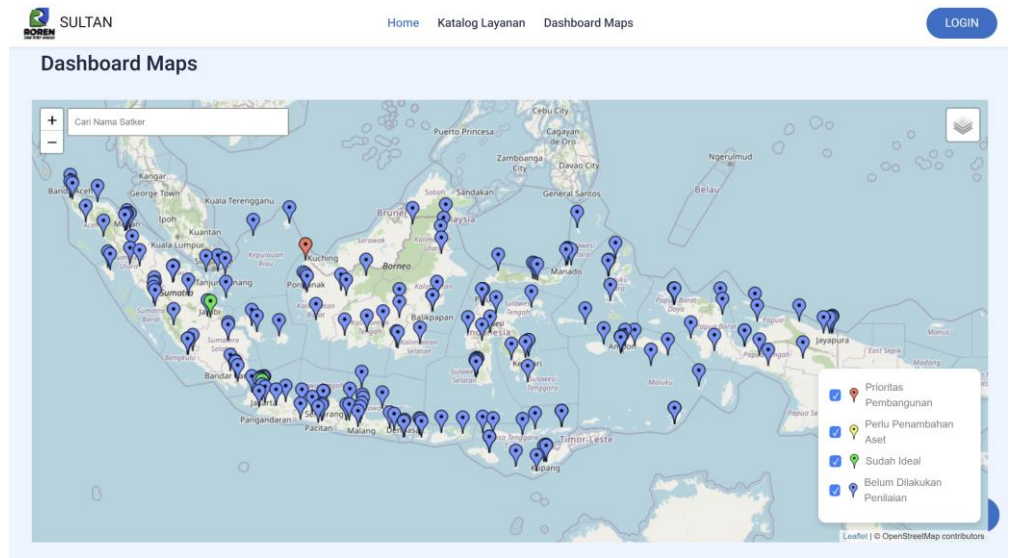
3. Pengembangan Aplikasi SITAMPAN. Aplikasi ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, penelaahan rencana kerja dan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. Aplikasi ini mampu membantu biro perencanaan dan stakeholder lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai status, kemajuan, bukti-bukti ataupun dokumen pendukung, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Anggaran di masing-masing satuan kerja baik pusat dan daerah.



Gambar 3.6 Display Aplikasi SITAMPAN

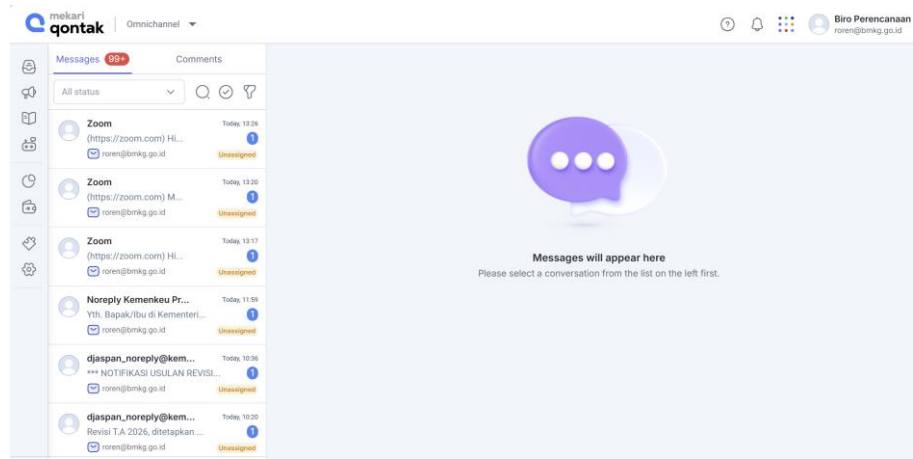
4. Pengembangan aplikasi SULTAN BMKG. Aplikasi SULTAN (Sistem Usulan dan Layanan Terpadu Anggaran Nasional) merupakan aplikasi internal yang digunakan sebagai platform terpadu dalam proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan BMKG, mulai dari pengusulan kegiatan, penetapan target kinerja, hingga penyesuaian dan pemantauan

anggaran. Aplikasi ini berfungsi untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, keseragaman standar dokumen, serta ketepatan waktu penyusunan usulan, sekaligus mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.



Gambar 3.7 Display Aplikasi SULTAN

5. Pengembangan aplikasi WhatsApp Roren Center. WhatsApp Roren Center merupakan media layanan komunikasi resmi Biro Perencanaan (Roren) yang digunakan sebagai pusat koordinasi, konsultasi, dan layanan informasi terkait perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi di lingkungan instansi. Layanan ini berfungsi sebagai kanal cepat untuk menyampaikan informasi, menerima pertanyaan, serta menindaklanjuti permasalahan teknis dari unit kerja, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, penggunaan aplikasi perencanaan/penganggaran, dan pemenuhan ketentuan administrasi.



Gambar 3.8 Display Aplikasi WhatsApp Roren Center (Halaman Admin)

5. Audit Arsip TU Biro Perencanaan. Pelaksanaan audit kearsipan Tata Usaha (TU) Biro Perencanaan menunjukkan capaian yang membanggakan dengan diraihnya Peringkat 2 dalam hasil evaluasi internal di lingkungan BMKG. Capaian ini mencerminkan komitmen Biro

Perencanaan dalam mewujudkan tata kelola arsip yang tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Hasil audit menunjukkan bahwa pengelolaan arsip telah dilaksanakan melalui penataan klasifikasi arsip, penerapan jadwal retensi arsip, pengamanan dokumen, serta pengelolaan arsip dinamis secara lebih terstruktur dan terdokumentasi. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat aspek administrasi perkantoran, tetapi juga mendukung akuntabilitas dan transparansi kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Biro Perencanaan BMKG Tahun 2025 menyajikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian kinerja tersebut tercermin pada realisasi indikator kinerja dari setiap sasaran kegiatan yang telah diperjanjikan.

Secara umum, sasaran kegiatan yang ditetapkan telah dapat dipenuhi dengan baik. Berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja yang menjadi tolok ukur utama, sebagian besar indikator menunjukkan capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan terdapat indikator yang realisasinya melampaui target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi telah berjalan secara efektif dan terarah.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan pimpinan serta seluruh jajaran Biro Perencanaan BMKG dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja. Selain itu, koordinasi dan sinergi antar unit kerja di lingkungan Biro Perencanaan BMKG semakin terbangun secara konstruktif, sehingga mampu mendukung pencapaian target kinerja secara optimal, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dapat dikelola dengan baik.

Sebagai unsur pendukung (supporting unit) dalam organisasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Biro Perencanaan memiliki peran strategis dalam memastikan integrasi antara perencanaan program, penganggaran, pemantauan, evaluasi, serta pelayanan terhadap pemangku kepentingan internal. Peran strategis tersebut menempatkan Biro Perencanaan sebagai simpul koordinasi dalam menjaga keterpaduan kebijakan dan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna mendorong optimalisasi fungsi dan peran Biro Perencanaan serta peningkatan kinerja yang berkelanjutan, diperlukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. **Penguatan integrasi kebijakan perencanaan dan penganggaran**, termasuk dalam pemantauan, pelaporan, dan evaluasi, yang melibatkan seluruh unit kerja di lingkup BMKG;
2. **Penyempurnaan sistem tata kelola perencanaan dan penganggaran**, termasuk proses penelaahan rencana kerja dan anggaran, pengukuran, serta evaluasi kinerja melalui optimalisasi aplikasi SITAMPAN, sehingga proses pengelolaan kinerja dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan;
3. **Penguatan organisasi**, melalui penyelarasan tugas dan fungsi, serta penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih komprehensif;
4. **Pengawasan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target indikator kinerja**, yang dimonitor secara berkala melalui sistem informasi kinerja daring (e-kinerja BMKG) mulai dari

unit eselon I–IV hingga satuan kerja (satker);

5. **Penerapan sistem penilaian prestasi kerja yang objektif**, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembinaan karier secara berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan manajemen SDM;
6. **Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas lingkungan kerja**, guna mendukung produktivitas dan kinerja organisasi.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan Biro Perencanaan BMKG dapat terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil, serta memperkuat kontribusinya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BMKG secara berkelanjutan.

LAMPIRAN DOKUMEN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adies Saputra, S.IP, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Guswanto, S.Si, M.Si
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Sekretaris Utama

Guswanto, S.Si, M.Si
NIP. 197203101994031002

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Biro Perencanaan

Adies Saputra, S.IP, M.Si
NIP. 198312142010011011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO PERENCANAAN

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien	Nilai evaluasi AKIP BMKG	76 Nilai
		Nilai Hasil Evaluasi IKPA BMKG pada Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran	87,5 Nilai
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan Evaluasi, Manajemen Risiko dan Kinerja	18 Dokumen
		Indeks Perencanaan Pembangunan	95 Nilai
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan	3,50 Indeks
		Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,8 Nilai

Kegiatan

1. Pengelolaan Layanan Perencanaan, Program Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi BMKG

Anggaran

Rp. 12.143.544.000,-

Pihak Kedua,
Plt. Sekretaris Utama

Guswanto, S.Si, M.Si
NIP. 197203101994031002

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Biro Perencanaan

Adies Saputra, S.IP, M.Si
NIP. 198312142010011011

2. REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN REVISI I



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Haryo Seno Pranandito, ST

Jabatan : Plt. Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Guswanto, S.Si, M.Si

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Sekretaris Utama

Guswanto, S.Si, M.Si
NIP. 197203101994031002

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Biro Perencanaan

Haryo Seno Pranandito, ST
NIP. 197707102006041003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO PERENCANAAN REVISI I

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien	Nilai evaluasi AKIP BMKG	76 Nilai
		Nilai Hasil Evaluasi IKPA BMKG pada Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran	87,5 Nilai
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan Evaluasi, Manajemen Risiko dan Kinerja	18 Dokumen
		Indeks Perencanaan Pembangunan	95 Nilai
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan	3,50 Indeks
		Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,8 Nilai

Kegiatan

1. Pengelola layanan Perencanaan, Program Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi BMKG

Anggaran

Rp. 12.143.544.000,-

Jakarta, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Sekretaris Utama

Guswanto, S.Si, M.Si
NIP. 197203101994031002

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Biro Perencanaan

Haryo Seno Pranandito, ST
NIP. 197707102006041003

3. REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN
REVISI II**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Haryo Seno Pranandito, ST

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Guswanto, S.Si, M.Si

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Juni 2025

Pihak Kedua,
Plt. Sekretaris Utama

Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan

Guswanto, S.Si, M.Si
NIP. 197203101994031002

Haryo Seno Pranandito, ST
NIP. 197707102006041003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN
REVISI II**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien	Nilai evaluasi AKIP BMKG	76 Nilai
		Nilai Hasil Evaluasi IKPA BMKG pada Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran	87,5 Nilai
		Indeks Perencanaan Pembangunan	95 Nilai
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan	3,50 Skala Likert
		Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,8 Nilai

Kegiatan

1. Pengelola layanan Perencanaan, Program Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi BMKG

Anggaran

Rp. 12.143.544.000,-

Jakarta, 18 Juni 2025

Pihak Kedua,
Plt. Sekretaris Utama

Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan

Guswanto, S.Si, M.Si
NIP. 197203101994031002

Haryo Seno Pranandito, ST
NIP. 197707102006041003

4. REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN
REVISI III**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Haryo Seno Pranandito, ST

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Guswanto, S.Si, M.Si

Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Plt. Sekretaris Utama

Guswanto, S.Si, M.Si
NIP. 197203101994031002

Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan

Haryo Seno Pranandito, ST
NIP. 197707102006041003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN
REVISI III**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP BMKG	76 Nilai
		Nilai Hasil Evaluasi IKPA BMKG pada Aspek Perencanaan Anggaran	87,5 Nilai
		Indeks Perencanaan Pembangunan	95 Nilai
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan	3,50 Skala Likert
		Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,75 Nilai

Kegiatan

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi yang Efektif dan Efisien

Anggaran

Rp. 11.843.544.000,-

Jakarta, 3 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Plt. Sekretaris Utama

Guswanto, S.Si, M.Si
NIP. 197203101994031002

Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan

Haryo Seno Pranandito, ST
NIP. 197707102006041003

5. SOP.PENYUSUNAN.LAPORAN.AKUNTABILITAS.KINERJA.INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA KEGIATAN				MUTU BAKU			KET.
		KEPALA BIRO PERENCANAAN	KOORDINATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI	SUBKOORDINATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI	TIM PENYUSUN (TF/JFT/JFU)	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberikan arahan/disposisi kepada Koordinator Pemantauan dan Evaluasi untuk menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).					Memo	10 menit	Disposisi	
2.	Memberikan arahan/disposisi kepada Subkoordinator Pemantauan dan Evaluasi untuk melaksanakan rapat koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).					Nota Dinas, Disposisi	10 menit	Disposisi	
3.	Mengusulkan nama - nama tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).					Memo	30 menit	Draft tim	
4.	Menerima daftar tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Jika setuju menandatangani, jika belum setuju dikembalikan untuk diperbaiki.					Draft tim	10 menit	Disposisi, Usulan ST	
5.	Menugaskan kepada tim yang telah ditunjuk untuk melaksanakan penyusunan LAKIP.					Usulan ST	20 menit	ST	SOP ST
6.	Menyiapkan bahan, data – data yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					Bahan LAKIP, ATK, Mekan dan Minum	1 hari	Bahan LAKIP	
7.	Mengadakan rapat/pertemuan untuk membuat konsep LAKIP dan menyampaikan konsep LAKIP kepada Subkoordinator.					ATK, Komputer, Bahan LAKIP	5 hari	Konsep LAKIP	
8.	Memeriksa konsep LAKIP Biro Perencanaan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk diperbaiki, jika setuju di paraf dan menyerahkan kepada Koordinator Bidang Pemantauan dan Evaluasi.					Konsep LAKIP	1 jam	Konsep LAKIP	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA KEGIATAN				MUTU BAKU			KET.
		KEPALA BIRO PERENCANAAN	KOORDINATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI	SUBKOORDINATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI	TIM PENYUSUN (TF/JFT/JFU)	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
9.	Memeriksa konsep LAKIP Biro Perencanaan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sub Koordinator Bidang Pemantauan dan Evaluasi untuk diperbaiki, jika setuju di paraf dan menyerahkan kepada kepala Biro Perencanaan					Konsep LAKIP, Notulen, Mekan dan Minum	1 hari	Draft LAKIP	
10.	Memeriksa konsep LAKIP Biro Perencanaan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Koordinator Bidang Pemantauan dan Evaluasi untuk diperbaiki. Jika setuju memberikan tandatangan dan menugaskan Koordinator Bidang Pemantauan dan Evaluasi untuk mendistribusikan Buku LAKIP.					Draft LAKIP	1 jam	Draft LAKIP, disposisi	
11.	Menggandakan dan mendistribusikan Buku LAKIP kepada Koordinator bidang di lingkungan Biro Perencanaan dan Sekretaris Utama sebagai bahan masukan bagi perbaikan pencapaian kinerja ke depan dan di unggah ke media komunikasi yang dapat diakses					Draft LAKIP, disposisi, penjiilidan	2 hari	Buku LAKIP, tanda terima	SOP Surat Keluar
12.	Menerima dan menyimpan buku LAKIP sebagai dokumen dan arsip.					Buku LAKIP	1 hari	arsip	SOP Arsip

Jakarta, 04 Januari 2022
Kepala Biro Perencanaan,

Aries Erwanto